



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPUAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS DAKWAH
3. NHK : 945599

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.667.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m²/84 m² di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 230.000.000
2. Tanah Seluas 917 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 327.500.000
3. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 905 m² di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 260.000.000
5. Bangunan Seluas 210 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 2.500 m² di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **257.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.013.614
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.931.513.614
III. HUTANG	Rp.	292.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.639.513.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.